



KESBANGPOL
PROVINSI LAMPUNG



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan Kehadirat ALLAH SWT yang mana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja dan mengacu pada Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2024, dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan P-Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 ini akan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, September 2024

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

DAFTAR ISI

	<i>hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I.1
B . Landasan Hukum	I.2
C. Maksud dan Tujuan	I.5
D. Sistematika Penulisan	I.5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra	II.1
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II.8
C. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II.15
D. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	II.20
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
A. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional	III.1
B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja	III.4
C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III.6
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV.1
BAB V PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel.	II.1	Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran Periode pelaksanaan Januari s/d Desember 2023	II.2
Tabel.	II.2	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023	II.9
Tabel.	II.3	Pencapaian Sasaran 1	II.10
Tabel.	II.4	Pencapaian Sasaran 2	II.13
Tabel.	II.5	Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada	II.15
Tabel.	II.6	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	II.21
Tabel.	III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	III.5
Tabel.	III.2	Tujuan dan Sasaran Renja 2024	III.6
Tabel.	IV.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2024, yang tetap berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun bersangkutan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini memuat tujuan, sasaran, arah, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, serta rencana-rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran anggaran yang harus dicapai dalam rangka mengemban tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerukunan Umat Beragama;
10. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
15. Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kesadaran Bela Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
17. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
20. Permendagri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
21. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

23. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
26. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
30. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai perencanaan bagi pencapaian tujuan, pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dan kebijakan serta sebagai salah satu upaya terciptanya pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung secara terukur untuk periode Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai acuan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan satu tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan telaahan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan pembangunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024, indikator target dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selama tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2019-2024. Terkait dengan hal tersebut, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah penjabaran perubahan perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran
Periode pelaksanaan Januari s/d Desember 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
			4		5=1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	67.755.747.112	90,4	14.626.772.113	75	179.243.662.331,8	20	19.165.455.536	26,67	10,70	20	33.614.227.651	26,67	49,91
5.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	97,9	905.697.400	95,71	124.974.600	95	120.217.000	95	105.607.000	100,00	86,08	95	230.662.400	97,44	25,49
5.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20	470.292.000	5	23.396.700	5	17.984.000	5	17.983.100	100,00	99,99	10	41.379.600	50,00	6,60
5.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	16	102.924.200	4	21.182.300	4	17.676.700	4	14.517.300	100,00	81,21	6	35.699.600	50,00	34,68
5.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	42	60.000.000	4	17.811.800	4	17.192.300	4	16.549.500	100,00	96,26	6	34.361.300	19,05	57,27
5.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	8	55.559.600			4	16.260.600	4	14.405.600	100,00	76,09	4	14.405.600	50,00	24,60
5.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	12	60.000.000	4	19.616.500	4	16.357.900	4	10.655.100	100,00	65,14	6	30.273.600	66,67	50,46
5.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keberhasilan Realisasi Kinerja SKPD	24	55.559.600	12	22.674.000	12	17.614.000	12	16.846.400	100,00	95,64	24	39.720.400	100,00	67,63
5.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	56	95.362.000	14	20.091.300	14	14.930.600	14	14.930.600	100,00	100,00	26	35.021.900	50,00	36,73
5.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan	95	58.417.921.756	100	12.091.444.035	92,5	176.626.363.191,6	91,67	16.902.010.642	99,10	9,56	91,67	29.793.455.477	96,49	51,00
5.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	204	28.620.764.356	51	6.062.371.735	51	6.566.275.631,8	51	6.217.006.343	100,00	94,38	103	13.279.279.977	80,00	46,13
5.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	156	31.590.374.400	39	6.769.369.600	39	170.197.497.560	26	10.643.339.200	66,67	6,25	65	17.412.705.600	41,07	55,12
5.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	46	104.000.000	12	23.395.300	12	22.414.000	12	19.487.400	100,00	86,94	24	42.562.700	50,00	41,23
5.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	162.763.000	16	22.459.600	16	22.176.000	16	22.176.000	100,00	100,00	36	44.635.600	50,00	43,44
5.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian laporan dan pengelola aset	96	127.512.000	100	20.095.000	94	35.962.000	90	32.053.500	95,74	69,13	90	52.146.500	93,75	40,90
5.1.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	42.804.000	4	9.061.000	4	24.278.000	4	22.206.400	100,00	91,48	8	31.269.400	66,67	79,57

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
			4		5=4-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.1.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32	54.106.000	6	11.034.000	6	11.664.000	6	9.845.100	100,00	84,26	16	20.679.100	50,00	36,53
6.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	90	191.620.000	79,56	14.729.000	85	54.400.000	80	49.820.000	94,12	91,55	80	64.549.000	85,59	33,69
6.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	99.000.000			5	45.000.000	5	45.000.000	100,00	100,00	5	45.000.000	45,45	45,45
6.1.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	26.400.000			104	4.400.000								
6.1.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	602	66.220.000	144	14.729.000	120	5.000.000	117	4.820.000	97,50	96,40	261	19.549.000	43,36	29,52
6.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum	90	5.207.340.416	83,33	1.051.030.471	85	1.323.596.140	85	1.276.761.606	100,00	96,61	85	2.329.612.077	94,44	44,74
6.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48	67.617.400	12	14.574.200	12	16.206.100	12	15.476.600	100,00	95,50	24	30.052.600	50,00	44,45
6.1.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144	1.440.866.600	36	342.075.000	44	325.766.000	44	319.564.000	100,00	96,10	60	661.659.000	55,56	45,92
6.1.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	46	39.193.000	12	6.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	100,00	100,00	24	21.000.000	50,00	53,56
6.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	48	111.478.216	12	27.529.400	12	25.405.040	12	23.355.100	100,00	91,93	24	50.864.500	50,00	45,65
6.1.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	46	517.619.200	4	29.966.000	12	99.236.000	12	92.206.000	100,00	92,92	16	122.194.000	33,33	23,61
6.1.1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48	135.350.000	6	9.215.000	12	17.207.000	12	17.207.000	100,00	100,00	16	26.422.000	37,50	19,52
6.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	2.095.216.000	60	619.648.671	60	626.774.000	60	797.950.906	100,00	96,51	120	1.417.599.777	50,00	46,96
6.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	82,5	1.774.678.840	67,5	316.976.529	80	352.652.000	80	332.676.031	100,00	94,26	60	649.656.560	96,97	36,61
6.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	627.316.840	9	115.311.829	12	124.652.000	12	104.676.031	100,00	83,84	21	219.969.660	43,75	26,59
6.1.1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	46	947.360.000	12	201.666.700	12	226.000.000	12	226.000.000	100,00	100,00	24	429.666.700	50,00	45,35
6.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	67,5	1.130.976.700	96,67	209.519.676	65	526.272.000	60	464.223.759	92,31	91,66	60	693.743.637	85,59	61,34
6.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertiznannya	26	796.062.700	7	156.369.676	6	315.750.000	5	273.425.702	83,33	86,59	12	431.795.560	42,66	54,10

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sd Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja sd Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA sd Tahun 2023 (%)	
			4		5=1		6		7		8=7/6*100		9=5/7		10=9/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.1.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	32	220.534.000	0	30.940.000	0	191.932.000	0	191.026.057	100,00	99,53	16	221.966.057	50,00	100,65
6.1.1.9.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	400	112.360.000	90	20.210.000	60	20.560.000	60	19.770.000	100,00	96,16	170	39.960.000	42,50	35,56
6.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	4.249.194.700	100	936.105.600	30	2.106.557.600	30	1.996.493.300	100,00	94,69	30	2.932.596.900	100,00	69,02
6.1.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	30	4.249.194.700	100	936.105.600	30	2.106.557.600	30	1.996.493.300	100,00	94,69	30	2.932.596.900	100,00	69,02
6.1.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45	143.247.500	12	22.166.700	3	30.141.000	3	30.141.000	100,00	100,00	15	52.307.700	33,33	36,52
6.1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.400	2.003.156.000	1.565	1.566.374.000	1.575	1.575.212.100	1.575	1.575.212.100	99,37	99,17	1.575	1.575.212.100	26,74	76,64
6.1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.260	1.604.306.700	2.740	800.621.700	420	266.693.600	335	201.736.000	79,76	75,02	3.075	1.002.357.700	56,24	55,55
6.1.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57	16.206.300	15	26.490.000	15	221.148.000	14	189.404.200	93,33	85,65	29	215.694.200	50,66	1.165,62
6.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30	2.155.125.900	79,55	434.671.400	30	1.077.377.000	30	1.017.929.730	100,00	94,46	30	1.452.601.130	100,00	67,40
6.1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	2.155.125.900	79,55	434.671.400	30	1.077.377.000	30	1.017.929.730	100,00	94,46	30	1.452.601.130	100,00	67,40

Kode Relineking	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d Tahun 2023		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s.d Tahun 2023 (%)	
			4		5=1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.1.3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokas, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokas Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dae	22	36.327.600	6	7.007.400	3	12.470.000	2	4.902.500	66,67	39,31	6	12.709.900	36,36	34,99
5.1.3.1.2	Penyusunan Bahan Penusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokas, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokas Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45	56.374.000	9	6.666.600	3	10.575.900	2	4.721.060	66,67	44,64	11	13.401.660	24,44	23,77
5.1.3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokas, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokas Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan S	1.700	789.373.400	450	165.520.000	3.630	667.486.300	3.795	660.316.500	99,09	96,96	4.245	845.636.500	236,45	107,15
5.1.3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokas, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokas Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	5.530	1.242.650.900	1.100	246.463.400	500	93.935.400	475	83.406.600	95,00	66,79	1.578	329.670.000	26,45	26,55
5.1.3.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokas, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokas Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemanta	60	30.400.000	5	6.200.000	15	272.907.400	14	244.563.050	93,33	89,62	19	250.793.050	31,67	824,94
5.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan omas aktif dalam tetahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	703.301.300	90,81	166.547.000	30	392.616.000	30	392.107.800	100,00	99,87	30	560.654.800	100,00	79,72
5.1.4.1	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	703.601.300	90,81	166.547.000	30	392.616.000	30	392.107.800	100,00	99,87	30	560.654.800	100,00	79,66
5.1.4.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas Pemberdayaan Omas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	2.055	606.001.300	470	129.373.000	565	293.222.100	565	293.222.100	100,00	100,00	1.035	422.595.100	50,36	69,74

Kode Relineing	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sd Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja sd Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA sd Tahun 2023 (%)	
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.1.4.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Media/ Sengeta Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelaporan Omas	60	97.600.000	13	39.174.000	2	99.393.900	2	98.855.700	100,00	99,49	15	138.059.700	25,00	141,45
6.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	2.345.375.000	66,72	979.761.900	30	1.035.665.600	30	1.019.651.500	100,00	96,45	30	1.999.413.400	100,00	65,25
6.1.5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	2.345.375.000	66,72	979.761.900	30	1.035.665.600	30	1.019.651.500	100,00	96,45	30	1.999.413.400	100,00	65,25
6.1.5.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.615	2.254.275.000	1.363	550.145.100	1.115	996.512.600	1.100	961.531.600	96,65	96,50	2.463	1.561.676.700	43,66	69,26
6.1.5.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60	91.100.000	10	66.016.000	15	39.153.000	15	38.119.900	100,00	97,36	25	106.136.700	41,67	116,51
6.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	4.433.739.200	63,25	1.173.551.600	30	746.260.000	30	735.361.000	100,00	96,26	30	1.909.212.600	100,00	43,06
6.1.6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30	4.433.739.200	63,25	1.173.551.600	30	746.260.000	30	735.361.000	100,00	96,26	30	1.909.212.600	100,00	43,06
6.1.6.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	16	340.000.000	2	100.000.000	2	106.304.500	2	106.304.500	100,00	100,00	4	206.304.500	22,22	61,27
6.1.6.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan	3.700	1.544.276.600	950	395.827.400	960	416.545.600	955	407.855.600	97,45	97,45	1.905	603.663.200	51,49	52,04

Kode Relening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
			4		5=1-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=8/4*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.1.6.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	5.000	1.417.297.200	195	363.225.600	350	80.944.200	350	80.631.100	100,00	99,86	545	464.056.700	10,90	32,74
5.1.6.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta P	60	23.267.200	15	30.623.600	15	32.116.500	15	31.252.600	100,00	97,31	30	61.676.200	50,00	265,94
5.1.6.1.5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	1.106.896.000	4	264.175.000	2	106.349.000	2	107.117.000	100,00	96,86	8	371.292.000	50,00	33,46
Rata-rata capaian Kinerja											94,26	13,19				
Predikat											Sangat Tinggi					

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program dan kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan LKj 2023 yang sudah disusun menetapkan satu sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2023 pencapaian realisasi fisik sebesar 94,28% dan realisasi keuangan 13,19%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2

**Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2023		CAPAIAN
				Target	Realisasi	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.	%	87,5	100	114,28
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.	Angka	72,75	74,09	101,84

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023, dari 2 (dua) buah indikator tersebut di atas kinerjanya melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.3
Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1					
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.				
IKU^(1/2)	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.				
Satuan	%				
Capaian prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik pencapaian prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung
1	2019	15	15	100,00	<p>Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung</p> <p>—●— Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung</p>
2	2020	15	15	100,00	
3	2021	80	100	125,00	
4	2022	80	100	125,00	
5	2023	87,5	100	114,28	

Secara umum, konflik dalam kehidupan sosial merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antar pihak baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan demikian potensi konflik sosial akan selalu ada di tengah masyarakat. Adapun komponen yang dapat mempengaruhi penurunan potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta

meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial.

Sasaran menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung memiliki 1 indikator yaitu Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 87,5% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,28% dengan kategori kinerja Sangat Memuaskan dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021, sasaran menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja prosentase menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung pada tahun 2019 dan 2020 memperoleh realisasi masing-masing 15%.Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%. Prosentase menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, realisasi prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga tetap 100 dikarenakan dari potensi konflik sosial yang terdata tidak ada yang menjadi peristiwa konflik sosial di Provinsi Lampung.

Sasaran 1			
Sasaran 1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.		
IKU ^(1/2)	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.		
Satuan	%		
2024		Nasional 2022	
Target	Capaian	Realisasi	
90,00	111	82,73	

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 111%. Realisasi prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung diketahui lebih baik bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang sejenis serta memiliki kesamaan yaitu dari Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta persentase penyelesaian konflik tahun 2022 (82,73%).

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pada tahun 2023 terdapat 90 potensi konflik yang terpetakan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 12 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 72 kasus, dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 90 potensi konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se- Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Tabel II.4
Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2					
Sasaran 2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.				
IKU^(2/2)	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.				
Satuan	Angka				
Capaian prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih Tahun 2019-2023					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik pencapaian prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih
1	2019	72,00	80,60	111,94	<p style="text-align: center;">Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih</p>
2	2020	72,25	74,09	102,54	
3	2021	72,25	74,09	102,54	
4	2022	72,25	74,09	102,54	
5	2023	72,75	74,09	101,84	

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan setiap warga Negara memiliki kebebasan politik yang setara. Hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh penduduk untuk memilih. Hak pilih dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Adapun komponen yang mempengaruhi penduduk menggunakan hak pilih yaitu meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik. Sasaran peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik memiliki 1 indikator, yaitu Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dengan realisasi sebesar 74,09% dari target sebesar 72,75% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 101,84% dengan kategori kinerja Sangat Memuaskan dan telah mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelum perubahan tahun 2021, sasaran meningkatnya indeks hak-hak politik Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja indeks hak-hak politik Provinsi Lampung pada tahun 2019 memperoleh realisasi 80,60 dan pada tahun 2020 memperoleh realisasi 74,09. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 realisasi masing-masing sebesar 74,09. Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya, realisasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tetap 74,09 dikarenakan masih menggunakan data hasil pemilukada 8 (delapan) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2020.

Sasaran 2			
Sasaran 2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik.		
IKU ^(2/2)	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih.		
Satuan	Angka		
2024		Nasional 2020	
Target	Capaian	Realisasi	
73,00	101,49	76,09	

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 maka capaian kinerja mencapai 101,49%. Realisasi prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih ini lebih rendah dari realisasi nasional partisipasi pemilih pemilukada 2020 yang berlangsung di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) sebesar 76,09.

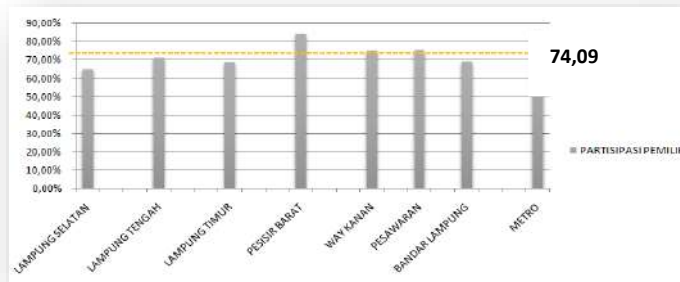
Capaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan capaian kinerja program sebesar 100%, sedang data prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih

dalam pemilu dan pilkada sebesar 74,09% masih menggunakan data hasil pemilukada 8 (delapan) kabupaten/Kota serentak se-Provinsi Lampung tahun 2020. Prosentase ini diperoleh dari perhitungan prosentase rata-rata partisipasi pemilih di 8 (delapan) kabupaten/kota. Adapun total jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.5
Prosentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu dan Pilkada

No.	Kabupaten/Kota	JumlahPemilih	Jumlah DPT	Prosentase
1	Lampung Selatan	457.537	704.367	64,96%
2	Lampung Tengah	654.189	922.398	70,92%
3	Lampung Timur	528.942	770.477	68,65%
4	Pesisir Barat	90.097	107.150	84,08%
5	Way Kanan	241.609	323.068	74,79%
6	Pesawaran	239.366	318.793	75,09%
7	Bandar Lampung	447.445	649.790	68,86%
8	Metro	98.857	115.844	85,34%
Rata-rata partisipasi				74,09%

Gambar II.1
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu



C. Isu-Isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pada tahun 2024 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019-2024, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- **Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung**
- **Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik**

2. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah:

a. Bidang Politik Dalam Negeri :

- 1) Tingginya dinamika perkembangan politik di Provinsi Lampung;
- 2) Belum optimalnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Provinsi Lampung;
- 3) Rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan/*stakeholder* kepemiluan di Provinsi Lampung;

- 4) Minimnya wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik perempuan, kaum difabel, pemilih pemula dan kaum muda milenial di Provinsi Lampung.
- b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
- 1) Menurunnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih terdapatnya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional
- 1) Masih banyaknya potensi konflik sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi/lembaga dalam pendataan dan pemantauan Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- d. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan:
- 1) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya dikalangan generasi muda di Provinsi Lampung;
 - 2) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama dan konflik pendirian tempat ibadah;
 - 3) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

3. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas di daerah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat;
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat;
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah;
- g. Masih tingginya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka-

- ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
 - c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat di Provinsi Lampung dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
 - d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
 - e. Stabilitasnya sistem politik di Provinsi Lampung sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis; dan
 - f. Sudah terbentuknya tim P4GN di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Provinsi Lampung tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat;
- b. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat;
- c. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan

- kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam;
 - e. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
 - f. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19;
 - g. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19;
 - h. Melakukan sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang.

D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Tabel II.6

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				23.018.940.132					396.297.134.893,78
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				23.018.940.132					396.297.134.893,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	18.820.501.232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	392.697.134.893,78
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	97,5	persen	311.123.800	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95	persen	86.816.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	145.704.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	15.194.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	4	dokumen	31.941.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	4	dokumen	11.176.700

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	14	dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	14	dokumen	12.407.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	31.941.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	11.590.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	10.962.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	31.941.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	11.994.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	25.595.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	13.489.600
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	95	persen	16.014.132.532	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	92,5	persen	390.627.219.593,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/ bulan	7.029.256.532	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/ bulan	6.687.497.193,78
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	8.920.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	383.895.132.400

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	32.276.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	22.414.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	31.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	22.176.000
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	96	persen	50.400.000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	94	persen	35.962.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	dokumen	16.800.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	laporan	16.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	laporan	24.278.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	16.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	11.684.000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	90	persen	80.400.000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	85	persen	54.430.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	54.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	orang	36.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	orang	13.200.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	orang	12.430.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120	orang/hari/kegiatan	13.200.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	orang/hari/kegiatan	6.000.000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	90	persen	1.463.919.200	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	85	persen	1.131.295.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	20.980.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	23.858.200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	paket	497.527.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	156.676.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	11.520.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	27.784.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	20.175.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	145.123.200	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	108.356.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	-	laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	723.769.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	794.446.000

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	82,5	persen	546.470.000	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80	persen	372.800.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	259.910.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	111.572.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	286.560.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	261.228.400
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	67,5	persen	354.055.700	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	65	persen	388.611.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	224.055.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	unit	368.151.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30	unit	20.460.000
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	Persen	1.278.732.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	Persen	1.800.000.000

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	30	Persen	1.278.732.000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	30	Persen	1.800.000.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	dokumen	53.650.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	dokumen	9.757.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	dokumen	53.650.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2740	orang	1.049.272.000	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	orang	60.270.500

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	orang	116.160.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	orang	21.497.500
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	laporan	6.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	laporan	57.107.000
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	Orang	-	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33	Orang	1.651.368.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	Persen	208.619.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	Persen	275.000.000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	Persen	208.619.000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	Persen	275.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500	orang	180.619.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	249	orang	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	laporan	28.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	laporan	75.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	Persen	685.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	Persen	325.000.000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	Persen	685.000.000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	Persen	325.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1400	orang	660.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	425	orang	275.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	%	1.424.735.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	%	600.000.000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30	Persen	1.424.735.000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	87,5	Persen	600.000.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4	dokumen	120.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-	dokumen	-

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1000	orang	474.512.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	480	orang	291.805.800
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1200	orang	430.348.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	280	orang	66.411.500

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	8.500.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	55.523.700
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4	dokumen	391.375.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	2	dokumen	186.259.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	30	persen	601.352.900	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	78,37	persen	600.000.000

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	persen	601.352.900	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	persen	600.000.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	dokumen	11.280.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	dokumen	3.609.300

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	dokumen	16.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	dokumen	-
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450	orang	221.160.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	516	orang	266.315.200

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1250	orang	342.912.900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	175	orang	79.279.900
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	laporan	250.795.600

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun pada tahun 2024 tidak terdapat usul program/kegiatan dari pemangku kepentingan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus mendukung Misi pertama RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai dengan melaksanakan agenda kerja sebagai berikut:

1. Lampung Merawat Indonesia, dengan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Lampung menuju bebas narkoba, dengan mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.

Dalam melaksanakan misi ke-satu dan agenda kerja tersebut diatas, pokok-pokok program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya untuk memperkokoh penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan media masa, serta lembaga dan organisasi terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;

3. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya;
4. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Sedangkan arah kebijakan nasional bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa;
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS;
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai;
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur

dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosialnya;

7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum;
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2024 antara lain:

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial dengan Penguatan Timdu PKS;
2. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN;
4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas;
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas Provinsi Lampung;
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama;
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik.

B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun tahun 2019–2024 menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kerukunan antar Umat Bergama**
- 2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019–2024, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1. Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung**
- 2. Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik**

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Penurunnya konflik sosial	15%	15%				
			Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung			80,00	80,00	87,50	100

	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	72,00	72,00				
			prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih			72,25	72,25	72,75	80

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019–2024 yaitu meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat maka ditetapkan sasaran jangka menengah yaitu meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator tujuan/sasaran:

1. Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung
2. Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih

Pernyataan tujuan dan sasaran Renja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	100 %
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	80 %

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Rencana Kerja Tahun 2024 menetapkan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan pagu indikatif belanja langsung sebesar Rp. 396.297.134.893,78 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan rincian seperti tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV. 1

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2024

KODE REK	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				396.297.134.893,78
08 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				396.297.134.893,78
08 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	392.697.134.893,78
08 01 01 1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95	persen	86.816.300
08 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	15.194.300

08 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	11.176.700
08 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	14	dokumen	12.407.400
08 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	11.590.600
08 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	10.962.800
08 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	11.994.900
08 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	13.489.600
08 01 01 1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	92,5	persen	390.627.219.593,78
08 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/bulan	6.687.497.193,78
08 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	383.895.132.400
08 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	22.414.000
08 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	22.176.000

08 01 01 1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	94	persen	35.962.000
08 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	laporan	24.278.000
08 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	11.684.000
08 01 01 1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	85	persen	54.430.000
08 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	orang	36.000.000
08 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	orang/hari/kegiatan	12.430.000
08 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	orang/hari/kegiatan	6.000.000
08 01 01 1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	85	persen	1.131.295.600
08 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	23.858.200
08 01 01 1.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	156.676.000
08 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	27.784.000
08 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	20.175.400
08 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	108.356.000

08 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	794.446.000
08 01 01 1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80	persen	372.800.400
08 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	111.572.000
08 01 01 1.08 09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	261.228.400
08 01 01 1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	65	persen	388.611.000
08 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	unit	368.151.000
08 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30	unit	20.460.000
08 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	Persen	1.800.000.000
08 01 02 1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	30	Persen	1.800.000.000
08 01 02 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	dokumen	9.757.000

08 01 02 1.01 02	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	orang	60.270.500
08 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	orang	21.497.500
08 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	laporan	57.107.000
08 01 02 1.01 12	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33	Orang	1.651.368.000
08 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	Persen	275.000.000
08 01 04 1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	Persen	275.000.000

08 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	249	orang	200.000.000
08 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	laporan	75.000.000
08 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	Persen	325.000.000
08 01 05 1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	Persen	325.000.000
08 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	425	orang	275.000.000

08 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	50.000.000
08 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	%	600.000.000
08 01 06 1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	87,5	Persen	600.000.000
08 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	480	orang	291.805.800

08 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	280	orang	66.411.500
08 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	55.523.700
08 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	2	dokumen	186.259.000
08 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	78,37	persen	600.000.000

08 01 03 1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	persen	600.000.000
08 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	dokumen	3.609.300
08 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	516	orang	266.315.200

08	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	175	orang	79.279.900
08	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	laporan	250.795.600

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen rencana tahunan yang didalamnya termuat program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Didalam P-RENJA ini juga disampaikan indikator kinerja setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2024 sebagai salah satu tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada P-RENJA ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung hendaknya berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat

dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Disamping hal tersebut, disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Lampung. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun non formal dengan para *stakeholders*. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan.

Bandar Lampung, September 2024

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001